

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

UMKM atau Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan kegiatan bisnis produktif yang berskala kecil, berdiri sendiri, dan dijalankan oleh perorangan ataupun badan usaha yang tidak memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan lain. Pada jenis usaha ini memiliki kehendak atau kuasa sendiri untuk menjalankan usahanya serta sang pemilik usaha memiliki kehendak sendiri dalam mengambil keputusan tanpa adanya paksaan atau campur tangan dari pihak yang berkepentingan (Hutabarat *et al.*, 2022). UMKM adalah suatu unit usaha kecil yang memiliki peran sebagai fasilitator dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan proses pemerataan dan pendapatan masyarakat, menciptakan stabilitas nasional, serta membantu dalam pertumbuhan ekonomi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai UMKM, adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh individu atau sekelompok kecil orang dengan batasan tertentu dalam hal kekayaan dan pendapatan.

UMKM berperan penting dalam perekonomian (Kartika & Musmini, 2022). Kontribusi UMKM dalam membangun ekonomi daerah dapat menjadi pendorong dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk menciptakan produk unggulan yang lebih baik, pencarian pasar, alih pengetahuan dan teknologi. Peran UMKM juga dapat menjadi pendorong laju pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja sehingga dapat menggerakkan sektor riil pada berbagai lapangan usaha sehingga dapat mendorong pendapatan asli daerah (PAD) (Halim, 2020). Tujuan dari usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia, menciptakan lapangan pekerjaan, mengembangkan perekonomian, serta terciptanya nilai tambah perekonomian nasional yang meningkat yang mampu bersaing dan mewujudkan pembangunan perekonomian secara berkelanjutan.

Pada tahun 2019, pandemi COVID-19 melanda, yang mengakibatkan

pembatasan berbagai aktivitas masyarakat. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam menjalani berbagai kegiatan sehari-hari. Keinginan untuk memperoleh produk dan jasa pun terhambat oleh pembatasan yang diterapkan demi mengurangi penyebaran virus tersebut. Kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat terhambat oleh kebijakan yang diterapkan untuk mengurangi penyebaran pandemi COVID-19. Hambatan ini menyebabkan pendapatan keuangan UMKM mengalami penurunan. Meskipun situasi UMKM sangat memprihatinkan, terdapat fakta yang mengejutkan: sektor UMKM menjadi penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, dengan kontribusi mencapai 60% selama masa pandemi COVID-19 (Julaika, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan UMKM di Indonesia sangat penting, karena mereka mampu bertahan dan memberikan sumbangan signifikan terhadap PDB. Dengan demikian, UMKM mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, baik sebelum pandemi maupun saat krisis ini melanda.

Kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pembangunan ekonomi daerah sangat penting. UMKM dapat berperan sebagai pendorong peningkatan sumber daya manusia, mendorong inovasi dalam menciptakan produk unggulan, serta memperluas pencarian pasar dan transfer pengetahuan serta teknologi. Selain itu, UMKM juga berkontribusi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja, yang pada gilirannya akan menggerakkan sektor riil di berbagai bidang usaha. Dengan demikian, UMKM berperan vital dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). (Halim, 2020)

Tabel 1. 1 Perkembangan UMKM Kota Jambi 2019 - 2023

Tahun	Mikro	Kecil	Menengah	Jumlah
2019	7.257	3.506	380	11.143
2020	7.257	3.506	-	10.763
2021	44.307	3.506	-	47.813

2022	46.912	3.835	-	50.747
2023	46.912	3.835	-	50.747

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah (2023)

Tabel 1. 1 memperlihatkan fluktuasi yang terjadi dalam perkembangan UMKM di Kota Jambi. Pada tahun 2019 dan 2020, jumlah UMKM mengalami penurunan sebanyak 380 unit. Namun, periode dari 2020 hingga 2021 menunjukkan peningkatan yang signifikan, dengan bertambahnya 37.050 unit UMKM. Selanjutnya, antara tahun 2021 dan 2022, jumlah unit UMKM di Kota Jambi kembali meningkat sebesar 2.934 unit. Akan tetapi, pada tahun 2022 hingga 2023, jumlah UMKM tetap di angka 50.747. Penurunan jumlah UMKM antara tahun 2019 dan 2020 tidak hanya disebabkan oleh pandemi COVID-19, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya. Di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas, tantangan dalam pembiayaan, kesulitan dalam pemasaran, serta masalah terkait pengelolaan usaha (Afifah et al., 2024). Oleh karena itu, UMKM adalah hal yang sangat penting untuk melakukan langkah-langkah yang tepat guna meningkatkan kinerja keuangan UMKM di daerah ini.

Lembaga keuangan, baik bank maupun lembaga non-bank, memegang peranan penting dalam mendukung perekonomian masyarakat. Manfaat yang diberikan terasa oleh semua lapisan masyarakat, baik yang memiliki penghasilan tinggi maupun yang rendah, dalam menjalankan usaha mereka. Salah satu tantangan utama yang dihadapi hampir semua negara, termasuk Indonesia, adalah masalah kemiskinan. Untuk mengatasinya, berbagai seminar dan pertemuan telah diselenggarakan di Indonesia dengan tujuan mengurangi tingkat kemiskinan. Salah satu langkah yang diambil adalah memperluas akses masyarakat terhadap lembaga keuangan, agar semua orang dapat merasakan manfaatnya. (Fajri et al., 2021).

Perkembangan teknologi digital telah memicu inovasi layanan jasa keuangan. Apalagi, saat ini jumlah pengguna internet di dalam negeri terus meningkat seiring kian meluasnya jaringan internet hingga ke pelosok negeri. Kini, akses layanan

jasa keuangan kian mudah sehingga inklusi keuangan turut meluas (Yogatama, 2023). Namun, di sisi lain, kecepatan perkembangan inovasi dan inklusi keuangan itu tidak diimbangi dengan kecepatan pemahaman masyarakat akan cara kerja layanan jasa keuangan. Seperti kasus UMKM yang dialami oleh pria bernama Abdul Samad di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, yang mengaku ditipu oleh Ketua Barisan Republik Febryan Aditya alias Herman. Abdul menyebut Herman melakukan penipuan dengan modus bantuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tanpa agunan. Kasat Reskrim Polres Bone AKP Andri Kurniawan membenarkan adanya laporan penipuan terkait bantuan UMKM tersebut. Dia mengatakan penyidik saat ini menunggu data lengkap dari pelapor untuk korbannya. Dapat dilihat dari kasus tersebut bahwa Abdul mengalami kasus penipuan karena kurangnya pengetahuan dan literasi terkait bantuan UMKM sehingga Abdul sebagai pelaku UMKM mudah untuk tertipu. (Pramono, 2024)

Gambar 1. 1 Literasi dan Inklusi Keuangan Provinsi di Indonesia 2022



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan 2022

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lastari (2023) survei yang dilakukam OJK dari literasi keuangan Provinsi jambi tahun 2022 sebesar 46,49%, dimana tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia tahun 2022 sebesar 65,43%. Dapat dikatakan bahwa tingkat literasi keuangan Provinsi Jambi masih sedikit dibawah

nasional. Dengan adanya literasi keuangan pelaku UMKM dapat memahami manajemen keuangan yang baik sesuai dengan kebutuhan operasionalnya dimana pelaku UMKM dapat mengontrol pemasukan dan pengeluaran usahanya (Wulandari & Paramita, 2023).

UMKM perlu membekali diri dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam pengelolaan keuangan agar usaha mereka dapat berjalan dengan lancar. Oleh sebab itu, literasi keuangan menjadi salah satu aspek yang sangat penting bagi setiap pelaku usaha. Tingkat literasi keuangan yang tinggi dapat mendukung pengelolaan keuangan yang lebih baik, yang mencakup manajemen pinjaman, tabungan, dan kredit, serta perencanaan untuk masa depan. Sebaliknya, rendahnya literasi keuangan di antara pelaku usaha dapat menimbulkan berbagai masalah serius dalam pengelolaan keuangan mereka. Tingginya tingkat literasi keuangan berkontribusi pada pengelolaan yang lebih baik dalam aspek seperti pinjaman, tabungan, kredit, serta dalam perencanaan masa depan. Sebaliknya, rendahnya tingkat literasi keuangan di kalangan pelaku usaha dapat menimbulkan berbagai permasalahan yang signifikan dalam pengelolaan keuangan mereka (Pusporini, 2020). Kurangnya pemahaman tentang keuangan membuat masyarakat kurang cermat dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan (Kasendah & Wijayangka, 2019). Pengelolaan keuangan yang baik pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat penting karena berpengaruh pada kelangsungan usaha tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa inklusi keuangan seharusnya dapat diakses oleh semua individu. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan layanan keuangan formal yang berkualitas tinggi, gratis, tepat waktu, andal, serta terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat (Christianty, R. *et al.*, 2020). Di Provinsi Jambi, tingkat inklusi keuangan sudah tergolong baik, terlihat dari ketersediaan layanan keuangan di Kota Jambi. Namun, masih ada sebagian masyarakat, terutama pelaku UMKM, yang mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah keuangan akibat rendahnya literasi keuangan. Situasi ini membuat UMKM menjadi ragu untuk meminjam modal dari layanan

keuangan yang tersedia (Wulandari & Paramita, 2023). Salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan menerapkan model literasi keuangan (Irmawati, 2013). Penelitian juga menunjukkan bahwa peningkatan literasi keuangan dan inklusi keuangan dapat berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan UMKM. (Sanistasya *et al.*, 2019)

Penelitian yang dilakukan Zulkifli (2023) mengenai permasalahan yang dihadapi UMKM dalam usahanya yaitu pencatatan dan pelaporan keuangan yang berkaitan erat dengan akuntansi. Banyak UMKM yang belum mengaplikasikan informasi keuangan pada usahanya, serta belum menerapkan sistem pencatatan akuntansi karena minimnya pemahaman serta anggapan mempersulit pekerjaan (Savitri & Siafudin, 2018). Pelaku UMKM yang dapat menyusun laporan keuangan dengan baik dan sesuai dengan standar akuntansi akan memiliki keunggulan dalam mengelola dana untuk memajukan usaha mereka. Untuk mencapai kinerja usaha yang optimal, sangat penting bagi pelaku UMKM untuk melakukan pencatatan transaksi, pengelolaan keuangan, dan penyusunan laporan keuangan secara efektif. Dengan demikian, kemampuan dalam menyusun laporan keuangan menjadi hal yang sangat penting bagi setiap pelaku UMKM.

Tabel 1. 2 Jumlah UMKM di Provinsi Jambi 2023

No	Wilayah	Mikro	Kecil	Menengah
1.	Kerinci	6.753	646	69
2.	Merangin	5.416	692	13
3.	Sarolangun	2.510	107	10
4.	Baratanghari	17.466	138	7
5.	Muaro Jambi	41.234	-	-
6.	Tanjung Jabung Timur	7.650	1.048	-
7.	Tanjung Jabung Barat	17.658	1.135	253
8.	Tebo	8.370	-	-
9.	Bungo	11.027	1.172	290

10.	Kota Jambi	46.912	3.835	0
11.	Kota Sungai Penuh	6.856	1.076	1.699
	Jumlah	171.852	9.849	2.341

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (2023)

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah Kota Jambi menjadi urutan pertama yang bertopang pada UMKM. Sesuai hasil sensus UMKM Kota Jambi yang dilakukan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Jambi tahun 2022 total jumlah UMKM di Kota Jambi sebanyak 50.747.

Beberapa masalah kinerja keuangan yang mungkin dihadapi UMKM di Kota Jambi termasuk rendahnya akses terhadap modal atau kredit dari lembaga keuangan, manajemen keuangan yang kurang efisien atau transparan, pengelolaan utang yang buruk, dan fluktuasi pendapatan yang tinggi (Lastari et al., 2023). Selain itu, UMKM juga mungkin menghadapi kesulitan dalam mengelola biaya produksi dan operasional, serta menghadapi risiko finansial yang tidak terduga seperti perubahan harga bahan baku atau fluktuasi nilai tukar. Observasi pendahuluan yang dilakukan peneliti terdahulu pada Kota Jambi para pelaku UMKM tidak sedikit yang masih terkendala akan terbatasnya sumber modal yang mereka miliki yang menghambat mereka untuk berkembang dalam usaha mereka sehingga berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM di Kota Jambi. (Hidayat, 2021).

Kinerja keuangan UMKM dapat diukur melalui berbagai indikator, seperti jumlah aset, omzet atau volume penjualan, serta laba usaha yang diperoleh dalam periode waktu tertentu (Amalia et al., 2022). Menurut Pramestiningrum dan Iramani (2020), kinerja UMKM didefinisikan sebagai hasil kerja yang dicapai oleh UMKM dalam jangka waktu tertentu, yang dihubungkan dengan ukuran nilai atau standar tertentu, serta selaras dengan peran dan tujuan yang ingin dicapai oleh UMKM tersebut.

Hal penting yang perlu diperhatikan oleh para pelaku UMKM dalam menjalankan bisnisnya adalah memperhatikan aspek keuangan. Berawal dari

terhubung atau tidaknya suatu unit usaha dengan lembaga keuangan, hingga bagaimana pengambilan keputusan untuk usaha. Salah satu aspek krusial yang berkaitan dengan permasalahan ini adalah literasi keuangan dan inklusi keuangan. Selain pemahaman mengenai kedua konsep tersebut, kemampuan dalam menyusun laporan keuangan juga memiliki dampak signifikan terhadap kinerja finansial UMKM. (Dewi & Purwantini, 2023)

Inklusi keuangan dapat dipahami sebagai upaya untuk menghapus segala bentuk hambatan yang menghalangi akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan yang terjangkau (Soetiono & Setiawan, 2018). Banyak pengusaha yang masih menghadapi tantangan dalam mengembangkan, bahkan mempertahankan usaha mereka. Hambatan yang dihadapi masyarakat dalam mengakses lembaga keuangan sering kali disebabkan oleh tingginya persyaratan yang ditetapkan oleh bank, yang terkadang sulit dipenuhi oleh pelaku usaha. Selain itu, adanya kesenjangan kemiskinan, suku bunga kredit mikro yang tinggi, kurangnya kemampuan manajerial di kalangan pelaku UMKM, dan terbatasnya saluran distribusi jasa keuangan juga berkontribusi pada perlunya penerapan inklusi keuangan. (Sanistasya *et al.*, 2019). Jika akses ke layanan jasa baik, maka UMKM tersebut dapat mengelola modal dengan lebih baik dan kinerja keuangan menjadi lebih baik.

Literasi keuangan dapat dipahami sebagai pemahaman tentang keuangan dan produk-produk keuangan yang dapat diterapkan oleh individu dalam pengambilan keputusan keuangan mereka, berdasarkan informasi yang ada mengenai cara mengelola keuangan (Pransiska *et al.*, 2024). Selain itu, menurut Pransiska *et al.* (2024) Semakin tinggi tingkat literasi keuangan, semakin baik pengelolaan keuangan pada usaha. Menurut OJK, literasi keuangan sangat penting dikarenakan literasi keuangan menjelaskan seberapa paham pemilik UMKM tentang keuangan. Dengan literasi keuangan yang baik, keputusan-keputusan keuangan yang diambil bisa lebih cerdas.

Selanjutnya, salah satu faktor yang dapat meningkatkan kinerja keuangan adalah kemampuan dalam menyusun laporan keuangan. Dalam konteks penelitian

ini, kemampuan menyusun laporan keuangan ditekankan pada aspek kemampuan intelektual. Kemampuan intelektual mengacu pada kapasitas individu untuk berpikir, beradaptasi, dan menyelesaikan masalah secara bijaksana, cepat, dan tepat, baik yang dihadapi langsung maupun yang ada di lingkungan sekitar (Whetyaningtyas & Mulyani, 2016). Oleh karena itu, untuk mencapai kinerja keuangan yang sukses, perlu dilakukan pencatatan transaksi yang rapi, pengelolaan keuangan yang efektif, serta pengelolaan kredit berdasarkan laporan keuangan. Dengan demikian, kemampuan menyusun laporan keuangan menjadi hal yang sangat penting bagi pelaku UMKM.

Fajri (2021), Darmawan *et.al* (2021) dan R.A Widyastuti (2022) menunjukkan bahwa inklusi keuangan mempunyai pengaruhnya terhadap kinerja keuangan UMKM. Inklusi keuangan merupakan aspek krusial bagi pelaku UMKM dalam mencari sumber pendanaan tambahan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha mereka. Sedangkan Hilmawati dan Kusumaningtias (2021), Ruli *et.al* (2021) dan Leatemia (2023) menyatakan inklusi keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM. Salah satu penyebab adalah masih terdapat banyak masyarakat yang tidak memiliki rekening bank, yang disebabkan oleh kesenjangan kemiskinan dan kesulitan prosedural.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yanti (2019), Kusuma (2021), dan Anggriani *et.al* (2023) yang menunjukkan hasil bahwa literasi keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM. Hal ini disebabkan masih banyak UMKM yang memiliki keterbatasan dalam akses layanan keuangan serta masih kurangnya pengawasan, relevansi materi pelatihan dengan kebutuhan UMKM. Sedangkan menurut Yanti (2019), Sri & Heni (2022) dan Miftahuttohmah *et.al* (2022) menyatakan literasi keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM. Literasi keuangan bagi para pelaku UMKM terletak pada kemampuannya untuk memberikan wawasan mengenai sumber pendanaan dan keterampilan yang diperlukan dalam mencari pembiayaan, sehingga mereka dapat mengoptimalkan struktur keuangan dan meningkatkan kinerja mereka.

Komaludin & Wahid (2017), Illarrahman & Susanti (2021) dan Kamila (2022) menyatakan bahwa kemampuan menyusun laporan keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM. Hal ini dikarenakan kemampuan menyusun laporan keuangan yang memiliki peranan penting dalam menentukan kinerja operasional UMKM. Akan tetapi berbeda dengan penelitian Nurlela (2015), Whetyaningtyad & Mulyani (2016) dan Zulkifli (2023) yang menyebutkan bahwa kemampuan menyusun laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja operasional UMKM. Mereka mengungkapkan bahwa kemampuan dalam menyusun laporan keuangan ternyata tidak memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini lebih merujuk kepada penelitian Fajri (2021), Meskipun sudah banyak para ahli yang membahas penelitian seputar UMKM dan tentunya penelitian ini memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian terdahulu seperti variabel, metode dan objek. Namun, penulis akan menegaskan sisi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Pertama-tama, penting untuk memahami perbedaan dalam variabel kemampuan menyusun laporan keuangan. Dalam penelitian ini, kemampuan menyusun laporan keuangan lebih ditekankan pada aspek intelektual, yang mencakup keahlian dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai aktivitas berpikir, mental, dan penalaran, serta untuk memecahkan masalah (Whetyaningtyas & Mulyani, 2016). Laporan keuangan berperan penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan usaha. Tanpa pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan yang tepat, akan sangat sulit untuk menilai kinerja operasional usaha kecil dan menengah (UKM) (Rostikawati & Pirmaningsih, 2019). Kedua, lokasi penelitian sebelumnya terletak pada kabupaten Tegal sedangkan lokasi peneliti yang penulis pilih terletak pada Kota Jambi. Ketiga, tahun peneliti sebelumnya pada tahun 2021 sedangkan tahun peneliti pada penulis tahun 2023.

Berdasarkan fenomena dan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis mengangkat penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Inklusi Keuangan,**

Literasi Keuangan, dan Kemampuan Menyusun Laporan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan UMKM di Kota Jambi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, perumusan masalah dari penelitian ini dapat diartikan sebagai berikut

1. Apakah inklusi keuangan, literasi keuangan dan kemampuan menyusun laporan keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM di Kota Jambi ?
2. Apakah inklusi keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM di Kota Jambi ?
3. Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM di Kota Jambi ?
4. Apakah kemampuan menyusun laporan keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM di Kota Jambi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh inklusi keuangan, literasi keuangan dan kemampuan menyusun laporan keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM di Kota Jambi
2. Untuk mengetahui pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM di Kota Jambi.
3. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM di Kota Jambi.
4. Untuk mengetahui pengaruh kemampuan menyusun laporan keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM di Kota Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi teoritis maupun

segi praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan secara teoritis mampu memberikan suatu yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu sebagai sumber bacaan dan memperdaya wawasan tentang inklusi keuangan, literasi keuangan, kemampuan menyusun laporan keuangan dan kinerja keuangan.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan penulis untuk menjadikan suatu sarana untuk mengimplementasikan pengetahuan tentang, inklusi keuangan, literasi keuangan, kemampuan menyusun laporan keuangan dan kinerja keuangan.

b. Bagi instansi pemerintah

Penelitian ini di harapkan dapat untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi dinas koperasi, usaha kecil dan menengah Kota Jambi.

c. Bagi pelaku UMKM

Inklusi keuangan merupakan suatu kondisi di mana masyarakat memiliki akses yang lancar, tepat waktu, dan aman terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas. Hal ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pelaku UMKM dalam mencari pendanaan. Literasi keuangan kini telah menjadi keterampilan hidup yang penting bagi setiap individu, sehingga mereka dapat mengelola dan merencanakan keuangan dengan baik demi mencapai kesejahteraan. Dengan meningkatnya literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM, diharapkan mereka dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan ekonomi yang dapat meningkatkan kinerja keuangan mereka. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menekankan pentingnya kemampuan menyusun laporan keuangan bagi pelaku UMKM, karena informasi yang terkandung dalam laporan keuangan memiliki peranan yang sangat vital dalam mencapai keberhasilan suatu usaha.